

**EVALUASI PROSES PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PADA
PEMERINTAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

Muhammad Rizky Bahalwan
NPP. 29.1693
*Asdaf Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: rizkibahalwan123@gmail.com

ABSTRACT

The background is planning and budgeting process is a role assignment process that uses responsibility accounting information to prepare the value of economic resources provided for each responsibility center leader to carry out their respective roles. This study aims to describe and evaluate the planning and budgeting process at the Ternate city government for the fiscal year 2020. The method used in this study is an evaluation research method with the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). In this study, the primary data collection process used data collection techniques through interviews with resource persons and observations of the research object and then on secondary data using documentation techniques. Data analysis in this study used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the evaluation of the planning and budgeting process in the city of Ternate in 2020 is in accordance with the procedures and stages of preparation as the results of the research ranging from concepts, processes, inputs and outputs according to applicable regulations, but there are several weaknesses that are often encountered in the preparation of the plan. in the city government of Ternate, especially the Regional Financial and Asset Management Agency, are; 1) Achievement indicators are often unclear and unmeasured (excessive sentences are used). 2).Basic data and assumptions that are often not valid. 3). and a less in-depth analysis where there is rarely an in-depth analysis that leads to "how to achieve" a target.

Keywords : *evaluation, Planning and Budgeting preparation process, model Cipp*

ABSTRAK

Latar Belakang Proses penyusunan Perencanaan dan Penganggaran merupakan proses berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk menyiapkan nilai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing. Penelitian ini **bertujuan** untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintah kota ternate tahun anggaran Tahun 2020. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Procces, Product*). Dalam penelitian ini proses pengumpulan data primer menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dan observasi terhadap objek penelitian kemudian pada data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa evaluasi dari

proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kota Ternate tahun 2020 sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan penyusunan sebagaimana hasil penelitian mulai dari konsep, proses, input dan output sesuai peraturan yang berlaku, namun Terdapat beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan rencana di pemerintah Kota Ternate khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut adalah; 1).indikator capaian yang sering kali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat yang digunakan berlebihan). 2).Data dasar dan asumsi yang sering kali kurang valid. 3). serta analisis yang kurang mendalam di mana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada “*how to achieve*” suatu target.

Kata kunci : Evaluasi, Proses penyusunan Perencanaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus berpedoman dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat *incremental* menjadi anggaran berbasis kinerja yang dimana sesuai dengan tuntutan reformasi. Anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dimana menggambarkan tentang rencana keuangan di masa yang akan datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan. Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi, dan stabilitasi. Anggaran sektor publik dari sudut makro berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya publik, melakukan distribusi ekonomi, dan menciptakan stabilitasi ekonomi, sosial dan publik (Mahmudi, 2016 : 60). Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Adanya tuntutan pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran, maka dalam hal ini diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya . Di samping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran ini diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Proses penyusunan Perencanaan dan Penganggaran merupakan proses penetapan peran yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk menyiapkan nilai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing. Dengan adanya anggaran maka sistem manajemen dapat membandingkan dan menganalisa biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan, yang dapat memberikan 7 informasi bagi manajemen untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan. Karena anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

terkait dengan tertundanya pembayaran Tambahan Penghasilan Penghasilan (TPP) dan insentif pegawai sekretariat DPRD Kota Ternate. keterlambatan ini lebih pada ketidakcakapan pemkot Kota Ternate dalam hal pengelolaan keuangan. Beliau juga menambahkan kondisi ini menggambarkan tidak profesional dalam pengelolaan keuangan. Kalau dikelola secara baik, hal-hal semacam tidak terbayarnya insentif dan juga gaji honorer itu tidak harus terjadi. "Kita lihat misalnya, tidak sinkron Pemda rata-rata tiap tahun mendapatkan predikat pengelolaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara, di setiap awal tahun penganggaran selalu ada masalah dari sisi perencanaan," Seharusnya, kata dia antara predikat opini pengelolaan keuangan itu sejalan dengan bagaimana proses dan perencanaan anggaran. Dirinya melihat, tata kelola keuangan daerah saat ini belum beres. Itu bisa dilihat dengan banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak mereka yang belum terbayarkan. Apalagi, sampai pada pengalihan honor dan insentif yang menjadi hak-hak pegawai justru dialihkan ke belanja lain.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal hasil penelitian Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander. 2019 Evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran di pemerintah provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Anindita Primastuti, 2018 Evaluasi proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Terdapat beberapa perbedaan diantara ketiga penelitian ini Setelah dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran di kota samarinda. masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan. dan Permasalahan yang paling krusial disebabkan oleh proses perencanaan 13 pembangunan dan penganggaran daerah berjalan. dan penganggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu pengaruh perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif sehingga terkadang menjadi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander. 2019 Evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran di pemerintah provinsi Sulawesi Utara Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggara di pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun 2017,2018,2019 masuk dalam Kategori sangat baik dengan membandingkan tiga dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Primastuti, 2018 Evaluasi proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. dimana penulis mencoba memperoleh gambaran mengenai bagaimana proses perencanaan Setelah dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran di kota samarinda. masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan. Permasalahan yang paling krusial disebabkan oleh proses perencanaan 13 pembangunan dan penganggaran daerah berjalan. dan penganggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu pengaruh perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif sehingga terkadang menjadi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah

1.5. Tujuan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintah kota ternate tahun anggaran Tahun 2020.

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan Teori Evaluasi menurut *Stufflebeam, (2003) CIPP* : □ *Context* □ *Input* □ *Process* □ *product* . Yaitu kajian terhadap Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perencanaan dan Penganggaran Ditinjau dari Dimensi Konteks

Tujuan dan sasaran proses perencanaan dan penganggaran, artinya dalam evaluasi proses perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat dari aspek tujuan dan sasaran perencanaan dan penganggaran. Yang memiliki dua indikator, yaitu : 1) Tertulis dan berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih dalam terkait indikator diatas, penulis melakukan wawancara dengan kepala Bidang Anggaran Bapak Iswandi Semarang, SE beliau menuturkan : Dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah kota ternate, telah tertulis dengan jelas dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota ternate 2021-2026. Yang telah disahkan oleh DPRD Kota ternate dan Wali Kota Ternate. Dari hasil wawancara diatas, dapat kita pahami bahwa dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Ternate telah tertulis dengan jelas dan berkelanjutan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator tertulis dan berkelanjutan telah terpenuhi. 2). Dasar kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai salah satu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. kebijakan juga merupakan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana dasar kebijakan terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran, maka penulis melakukan wawancara dengan kepala bidang anggaran, Bapak Iswandi Semarang, SE beliau mengatakan : untuk perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Ternate sudah berpedoman dan berdasrakan peraturan menteri dalam negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan hasil wawancara diatas hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan dan Penganggaran pada pemerintah kota ternate telah berpatokan dan berpedoman dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017. Sehingga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran telah mempunyai suatu legalitas yang begitu kuat..

3.2 Proses Perencanaan dan Penganggaran Ditinjau dari Dimensi Input

Hasil analisis terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintah kota ternate dapat memenuhi dimensi konteks menurut Stufflebeam. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anindita Primastuti Pada tahun 2018 . simpulan penelitiannya menegaskan bahwa Setelah dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran. masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan. Permasalahan yang paling krusial disebabkan oleh proses perencanaan dan penganggaran yang terpisah 75 dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu pengaruh perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif sehingga terkadang menjadi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

3.3 Proses Perencanaan dan Penganggaran Ditinjau dari Dimensi Process

Proses perencanaan dan penganggaran pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Proses perencanaan telah di atur dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan, pembangunan Nasional. Adapun pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam pembuatan proses perencanaan dalam penganggaran tidak hanya dibantu orang-orang penting yang paham mengenai perencanaan tersebut akan tetapi terlibat juga pengawasan secara langsung oleh banyak pihak baik DPRD maupun SKPD untuk memampung berbagai usulan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian sebelumnya meneliti mengenai Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. dimana penulis mencoba memperoleh gambaran mengenai bagaimana proses perencanaan, pembangunan dan penganggaran daerah berjalan.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran berjalan setiap tahun dan prosesnya pun berjalan sepanjang tahun. Sedangkan disaat yang sama pemerintah daerah juga harus terus-menerus melakukan administrasi dan transaksi keuangan juga berjalan. Ditambah lagi dengan ketentuan permendagri yang sudah menentukan besaran jumlah anggaran untuk beberapa jenis mata anggaran tertentu. maka penulis dapat menarik kesimpulan Dalam proses perencanaan dan penganggaran di kota ternate meliputi beberapa langkah panjang yang melibatkan berbagai pihak dan beberapa tim pengawas mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, yang dimanan prosesnya dimulai dari perencanaan pembangunan pada pemerintah pusat yang kemudian prosesnya berlanjut sampai ke pemerintah daerah. Sama halnya dengan temuan anindita bahwa bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan. Permasalahan yang paling krusial disebabkan oleh proses perencanaan dan penganggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu pengaruh perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif sehingga terkadang menjadi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (Anindita, 2018). Layaknya proses perencanaan dan penganggaran, dalam hal ini masih juga memiliki beberapa kelemahan yang dimana memiliki kesamaan dengan temuan layaknya Nofriyanto, Lintje, dan Stanly Beberapa faktor penyebab terjadinya inkonsistensi program dan kegiatan antara perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu Terdapat kesalahan

penginputan, kesalahan nomenklatur, Hasil evaluasi tidak mencapai target yang signifikan, Adanya keterbatasan anggaran, Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, Penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Keadaan (darurat) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja (Nofriyanto, lintje&stanly, 2019).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, serta analisis dan informasi yang terkumpul, maka penulis dapat menarik kesimpulan Dalam proses perencanaan dan penganggaran di kota ternate meliputi beberapa langkah panjang yang melibatkan berbagai pihak dan beberapa tim pengawas mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, yang dimanan prosesnya dimulai dari perencanaan pembangunan pada pemerintah pusat yang kemudian prosesnya berlanjut sampai ke pemerintah daerah. Dokumen perencanaan yang telah di buat oleh pemerintah pusat kemudian di serahkan kepada pemerintah daerah untuk di adopsi dan diikuti proses perencanaan tersebut dan harus menyesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah pada saat itu. Perencanaan pembangunan di kota ternate mulai dari *Context, Process, Input dan Output* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang harus di perbaiki sesuai dengan ketentuannya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelarasan dalam perencanaan serta penganggaran dan dalam penyusunan proses Perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka dan lebih transparan tidak hanya menghadirkan para pejabat-pejabat pemerintah saja melainkan tokoh masyarakat sebagai perwakilan langsung dari masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mengetahui prosedur penyusunan perencana dan penganggaran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, P. (juni 2018:). *Evaluasi proses perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) di kota samarinda provinsi kalimantan timur. Je&kp*, vol 5, no.1 41 - 56.
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Bastian, Indra.2013.*Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Yogyakarta : BPF
- Dunn. N, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. yogyakarta: Samodra Wibawa.
- Halim Abdul.2012.*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta : Selemba Empat
- Khusaini, Moh.2018.*Keuangan Daerah*. Malang:UB Press
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Moenek, Reydonnizar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Government pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Rosda.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moelong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat
- Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander. (Juli 2019). *Evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. *jurnal EMBA Vol.7 No.3* , Hal. 4017- 4025.
- Rahajeng, Anggi. 2016. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR Press
- Simangungsong, Fernandez dan Sadu Wasistiono. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Syamsi, I. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali

